



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA

RENCANA KERJA SEKRETARIAT 2026

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA



www.bappebti.go.id



[@bappebti](https://www.instagram.com/bappebti)



[Bappebti Kementerian Perdagangan](https://www.facebook.com/Bappebti.Kementerian.Perdagangan)



[infobappebti](https://twitter.com/infobappebti)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Rencana Kerja Sekretariat Bappebti Tahun Anggaran 2026 telah selesai disusun. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 20 Ayat (1), dimana Pimpinan Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rancangan Renja K/L mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan serta pagu indikatif Bappebti Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja Sekretariat Bappebti Kemendag adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program kerja dan target kinerja yang ditetapkan Kementerian Perdagangan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi K/L, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Rencana Kerja Sekretariat Bappebti ini diharapkan juga mampu membantu memudahkan proses evaluasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran Kegiatan Sekretariat Tahun Anggaran 2026.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Tahun Anggaran 2026, sehingga Rencana Kerja ini tersusun dengan baik. Akhir kata, semoga Rencana Kerja Sekretariat ini dapat bermanfaat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat pada khususnya dan Bappebti pada umumnya.

Jakarta, Desember 2025

 **Sekretaris Bappebti**

IVAN FITHRIYANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Ruang Lingkup	4
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	5
A. Capaian Kinerja Sekretariat Tahun 2024	5
B. Kinerja Anggaran Tahun 2024	16
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026	17
A. Visi dan Misi	17
B. Program, Kegiatan, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan,	17
C. Indikator Sasaran Kegiatan dan Aktivitas Pendukung	18
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai kebijakan dan langkah strategis perlu diambil agar perdagangan berjangka yang legal dapat berkembang dengan baik

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan kegiatan bisnis yang kompleks dan beresiko tinggi, terdapat unsur *leverage*, dimana dengan penempatan dana (margin) yang kecil dapat memperoleh keuntungan yang besar atau menderita kerugian yang besar.

Dengan arah perkembangan Perdagangan Berjangka ini, resiko perdagangan berjangka semakin besar, untuk itu Bappebti dituntut untuk lebih baik lagi dalam melakukan penguatan sehingga perdagangan berjangka dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan yaitu sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Indonesia memiliki beragam jenis komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan. Komoditi-komoditi unggulan tersebar di seluruh daerah Indonesia baik komoditi yang sudah memiliki daya saing di pasar internasional maupun komoditi unggul berdasarkan kompetensi daerah.

Dengan adanya keragaman komoditi tersebut menjadi peluang untuk menciptakan pasar komoditi yang terorganisir. Pasar komoditi yang dapat dikembangkan menjadi Pasar Berjangka Komoditi, yang dapat menciptakan stabilisasi harga dan pemberdayaan produsen komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi. Pasar lelang mampu membentuk harga yang transparan dan menjaga kualitas barang yang diperdagangkan.

Dalam era globalisasi ekonomi, data dan informasi merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat mendukung daya saing seluruh sektor termasuk sektor perdagangan. Dengan adanya data dan informasi yang berkualitas, kebijakan dan proses

pengambilan keputusan akan semakin optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah. Faktanya, dalam pemasaran, petani produsen seringkali tidak mempunyai informasi harga yang diperlukan sebagai referensi dalam menentukan harga jualnya. Di samping itu, dengan karakteristik komoditi pertanian yang sangat bergantung pada musim, harga komoditi pertanian sangat berfluktuasi yang tidak menguntungkan baik sebagai petani produsen maupun industri pengguna produk tersebut.

Menghadapi permasalahan tersebut, banyak negara telah mempergunakan secara luas instrumen kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Melalui instrumen kontrak berjangka tersebut, petani produsen, industri pengguna, dan eksportir dapat melakukan pengelolaan risiko melalui mekanisme *hedging* agar mereka terhindar dari kerugian akibat fluktuasi harga. Penyelenggaraan perdagangan berjangka memungkinkan terbentuknya harga suatu komoditi beberapa bulan ke depan yang ditetapkan melalui mekanisme pasar. Harga yang terjadi dapat dijadikan sebagai acuan bagi petani produsen atau industri pengguna, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perdagangan komoditi tersebut. Kehadiran perdagangan berjangka juga memberikan alternatif investasi yang menarik karena dengan modal yang relatif terbatas dalam bentuk margin dapat bertransaksi dalam volume transaksi yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan berbagai kebijakan dan langkah strategis agar perdagangan berjangka yang legal dapat berkembang dengan baik. Penyelenggaraan perdagangan berjangka yang benar, tertib, dan aman akan memberikan kontribusi yang strategis bagi perekonomian nasional sebagai sarana lindung nilai yang efektif, pembentukan harga yang transparan, dan sebagai alternatif investasi yang sangat menarik, pembukaan peluang kerja, dan lain-lain.

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Sekretariat Bappebti TA. 2026 ini disusun dengan maksud dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi Sekretariat Bappebti dalam menjalankan operasional Sekretariat

sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, sehingga diharapkan dapat tercipta koordinasi pelaksanaan program kegiatan yang sebaik-baiknya di internal Bappebti maupun eksternal dengan unit yang terkait.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Bappebti merupakan unit eselon II di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Pada tahun 2026 terjadi perubahan Organisasi Tata Kerja Kementerian Perdagangan sesuai Permendag Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dimana terjadi perubahan struktur serta tugas dan fungsi pada Sekretariat Bappebti. Sekretariat Bappebti mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Sekretariat Bappebti menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, pelayanan informasi publik, serta pengelolaan data dan informasi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja, fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik/kekayaan negara di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dengan adanya perubahan Organisasi Tata Kerja Kementerian Perdagangan sesuai Permendag Nomor Nomor 6 Tahun 2025 yang dimaksud, maka dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja kegiatan Sekretariat Bappebti.

Ketujuh fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bappebti tidak terlepas dari seluruh unsur di unit kerja, yang terdiri dari Bagian Program dan Kerja Sama, Bagian Umum, serta seluruh jabatan fungsional di dalamnya.

C. Ruang Lingkup

<i>Ruang Lingkup</i>	Sesuai dengan Keputusan Mendag Nomor 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
<i>Penyusunan</i>	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
<i>Rencana Kerja</i>	Lingkungan Kementerian Perdagangan, maka ruang lingkup
<i>(Renja) Sekretariat</i>	penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Bappebti TA. 2026
<i>Bappebti TA. 2026</i>	meliputi:
Bab I	Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta ruang lingkup
Bab II	Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya yang memaparkan perkembangan dan hasil-hasil program kegiatan Sekretariat Bappebti pada tahun 2024
Bab III	Rencana Kerja meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, kegiatan dan Indikator Kegiatan Sekretariat Bappebti TA. 2026
Bab IV	Penutup

BAB II

CAPAIAN KINERJA

SEKRETARIAT BAPPEBTI

TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT BAPPEBTI TA 2024

Capaian Kinerja Sekretariat Bappebti TA 2024 Dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat BAPPEBTI yaitu “Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi” ditetapkan 5 indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja sekretariat.

Pada bab ini akan dijelaskan capaian per indikator kinerja secara terperinci dan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut. Sebagian Indikator Kinerja Sekretariat BAPPEBTI diukur dan dilihat pencapaiannya berdasarkan penilaian indikator oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan sebagian indikator lainnya dinilai melalui metode survei yang dilakukan pada 2024.

Tabel 2.1 Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian (%)
1	Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI	87%	88.4%	101.60
2	Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI	86 Nilai	88.28	102.65
3	Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI	87 Nilai	83.52	96
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI	86 Nilai	82.16	95.50
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	92 Nilai	91.58	99.54
Rata – Rata Capaian				99.40

Sumber : Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian tahun 2024 tercatat 99,40%. Secara rinci capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

IK-1: Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan. Dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat BAPPEBTI kepada unit kerja di lingkungan BAPPEBTI menjadi landasan utama dalam keberhasilan kinerja BAPPEBTI secara keseluruhan. Tingkat kualitas layanan yang diberikan akan meningkatkan produktivitas pegawai, yang selanjutnya akan memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder eksternal, yang pada akhirnya menentukan tingkat kinerja organisasi yang lebih tinggi. Guna mengetahui tingkat kepuasan unit kerja terkait pelayanan internal yang diberikan, dilaksanakan survei terhadap pegawai.

Nilai Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI diperoleh berdasarkan survei (penyebaran kuesioner) kepada internal BAPPEBTI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BAPPEBTI dalam menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan; pelaksanaan kerja sama, dan pelayanan informasi publik; pelaksanaan urusan kepegawaian organisasi dan tata laksana; pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko; pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara; dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan :

Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK-1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian (%)
Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI	87%	88.4%	101.60

Sumber : Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI pada Tahun 2024 adalah 88,4% atau sebesar 101,60%. Bila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 101,43% terdapat peningkatan sebesar 0,17%. Bila dibandingkan dengan target pada periode akhir Rencana Strategis (target 87%), realisasi Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI pada tahun 2024 tercapai sebesar 88,4% atau 101,60% dari target periode akhir Rencana Strategis Sekretariat BAPPEBTI.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen antara lain:

1. Pengadaan Sarana Internal BAPPEBTI

Penyediaan bahan untuk keperluan kerja guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan sehingga perlu dipersiapkan hal – hal yang berkaitan dengan keperluan layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead), diantaranya yaitu Peralatan dan Mesin yaitu penyediaan alat pengolah data dan peralatan elektronik dan peralatan fasilitas perkantoran. Sampai dengan Desember Tahun 2024 telah dilakukan pengadaan penunjang pekerjaan seperti pengadaan laptop/notebook, scanner dan sarana lain yang menunjang pekerjaan.

2. Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

Kegiatan ini merupakan koordinasi inventarisasi BMN BAPPEBTI tahun 2024, dimaksudkan agar pencatatan BMN BAPPEBTI selalu mengikuti aturan dan kebijakan terbaru terkait BMN khususnya yang berasal dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, dan untuk mengetahui jumlah, nilai serta kondisi BMN BAPPEBTI yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada di daerah yang berstatus belum dihibahkan kepada daerah yang bersangkutan, serta sebagai upaya Sekretariat BAPPEBTI dalam mewujudkan tertib administrasi dan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN di Satker Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

3. Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)

Kegiatan ini merupakan koordinasi pemindahtanganan BMN BAPPEBTI tahun 2024, dimaksudkan agar tertib administrasi dalam pencatatan BMN BAPPEBTI khususnya yang peruntukkan pengadaannya akan diserahkan ke daerah dalam bentuk hibah BMN, serta untuk melakukan penghapusan BMN yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak layak lagi digunakan atau jika dilakukan perbaikan dinilai tidak ekonomis dibandingkan jika dilakukan pembelian barang yang sama dengan fungsi yang sama.

4. Workshop Bidang Kepegawaian

Untuk meningkatkan kemampuan SDM BAPPEBTI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dilakukan kegiatan workshop yang dapat mendukung kompetensi pegawai BAPPEBTI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kompetensi pegawai BAPPEBTI. Bentuk kegiatan ini berupa workshop yang dilaksanakan di kantor BAPPEBTI. Diharapkan dengan adanya workshop dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai. Setiap tahun BAPPEBTI mengadakan workshop sesuai dengan kebutuhan para pegawai.

Pada tahun 2024, telah dilakukan pelatihan pegawai di lingkungan Bappebti berupa pelatihan Awareness Certified Information Systems Auditor (CISA). Sertifikasi CISA bertujuan untuk mengukur kompetensi dalam berbagai aspek keamanan informasi, termasuk audit, pengendalian, asuransi, dan tata kelola. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada 3-5 Juli 2024.

Selain itu, telah diselenggarakan pula Bimbingan Teknis Seleksi PPPK Tahun 2024 bagi pegawai PPNP di lingkungan Bappebti yang mendaftar seleksi PPPK pada 26-28 Agustus 2024. Bimtek bertujuan mempersiapkan peserta dalam menghadapi proses seleksi dengan lebih baik. Beberapa tujuan dan aspek penting dari bimtek seleksi PPPK tersebut meliputi pemahaman proses seleksi, materi ujian, strategi belajar, simulasi ujian / tryout, pengenalan kompetensi, sesi tanya jawab, dan peningkatan kepercayaan diri. Bimtek ini sangat penting agar

PPNPN di lingkungan Bappebti dapat mempersiapkan diri dengan baik dan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil dalam seleksi PPPK. Dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pegawai Bappebti telah melakukan pelatihan Bahasa Inggris Profesional untuk 15 (lima belas) pegawai Bappebti yang diselenggarakan 2 (dua) kali seminggu sejak Oktober sampai dengan Desember 2024. Materi pelatihan terdiri dari introduction in english, structure and writing correspondence for business, listening comprehension, vocabulary and reading comprehension, communicate effectively in business areas of presentations, meetings and negotiations dan developing the confidence needed in handling business situations effectively. Pelatihan bahasa Inggris ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun bahan pimpinan dan berpartisipasi dalam forum internasional.

5. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) kepegawaian merupakan aktor utama penggerak birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik oleh karena itu pengelolaan SDM melalui pembinaan administrasi kepegawaian secara efektif merupakan suatu keharusan dalam suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait pembinaan kepegawaian (BKN, Menpan-RB, Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan dan Pusklat Aparatur Perdagangan). Kegiatan ini meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penyusunan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta penyusunan sistem kinerja pegawai. Sampai dengan Desember 2024 tercatat 89 pegawai Bappebti yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan 21 pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat (KP) serta 2 pegawai yang pensiun dari Bappebti pada tahun 2024.

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan sempurna. Tahap pengembangan sumber daya manusia ini terdapat dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan

pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri yang dimaksudkan agar potensi yang dimiliki pegawai dapat digunakan secara efektif.

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam memberikan layanan dukungan manajemen yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki BAPPEBTI belum update sehingga seringkali terjadi perbedaan persepsi dengan unit lain.

IK-2: Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI

Perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang dinamis menuntut penyebaran informasi yang masif dan efektif baik kepada stakeholders BAPPEBTI, pelaku usaha, akademisi, media, maupun masyarakat luas. Informasi dibutuhkan pelaku usaha dan stakeholders untuk menentukan arah kebijakan perusahaan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebijakan lainnya dari BAPPEBTI sebagai regulator. Di sisi lain masyarakat membutuhkan update informasi sebagai bagian dari hak warga negara Indonesia. Untuk itu penguatan informasi publik dan literasi menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendukung kinerja BAPPEBTI terkait penyebarluasan informasi di bidang PBK, SRG, dan PLK. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan literasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Untuk mengetahui efektifitas kegiatan publikasi/literasi dan layanan informasi publik BAPPEBTI, diperlukan evaluasi dari masyarakat pengguna layanan melalui kegiatan survey kepuasan masyarakat. Survey kepuasan masyarakat atas pemberian layanan informasi publik BAPPEBTI dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan yang selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK-2 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian (%)
Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI	86 Nilai	88.28	102.65

Sumber : Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI pada Tahun 2024 tercapai sebesar 88,28 atau capaian 102,65%. Biladibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau tahun 2023 yaitu sebesar 97,70%, atau naik sebesar 4,95%. Bila dibandingkan dengan target pada periode akhir Rencana Strategis (target 86), realisasi Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI pada tahun 2024 tercapai sebesar 88,28 atau 102,65% dari target periode akhir Rencana Strategis Sekretariat BAPPEBTI. Hasil survey menunjukkan realisasi indeks kepuasan masyarakat pada layanan publikasi BAPPEBTI sudah melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2024.

Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu maraknya pemberitaan terkait peretasan salah satu platform perdagangan Aset Kripto yang berizin BAPPEBTI pada saat pengambilan data survey tahap II yang dilakukan pada Bulan September 2024.

Untuk merespon hal tersebut, Tim Kerjasama dan Informasi Publik meningkatkan layanan publikasi dengan cara melakukan publikasi secara massif di media cetak maupun online.

IK-3: Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI

Reformasi Birokrasi dipandang sebagai faktor penting dalam pembangunan suatu negara, di mana reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mampu menjadi tulang punggung bagi pembangunan suatu negara. Reformasi birokrasi akan berdampak langsung kepada penciptaan good governance yang akan memunculkan perbaikan kualitas kebijakan publik yang tepat sasaran berdasarkan kondisi nyata di lapangan, adanya transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Perubahan dalam pola pikir dan pola perilaku dalam kinerja pegawai serta Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola di Kementerian Perdagangan adalah tujuan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilakukan melalui upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu: manajemen perubahan,

peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, organisasi/kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Adapun pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I adalah melalui penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pedoman Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Asesor internal kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Asesor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI	87 Nilai	83.52	96

Sumber : Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI pada tahun 2024 terealisasi sebesar 85,52 atau persentase capaian 96%.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 tercapai 103,39% atau mengalami penurunan sebesar 7,39%. Bila dibandingkan dengan target pada periode akhir Rencana Strategis (target 87), realisasi Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI pada tahun 2024 tercapai sebesar 83,52 atau 96% dari target periode akhir Rencana Strategis Sekretariat BAPPEBTI.

IK-4: Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI

Penentuan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam sebuah instansi memerlukan suatu perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan dengan memperhatikan ukuran baik dari segi efektifitas maupun efisiensi waktu dan biaya yang digunakan sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat luas.

Dengan mengacu pada anggaran berbasis kinerja, maka perlu Program Kerja yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Program kerja tersebut harus mengacu pada kebijakan pemerintah dan bersinergi dengan

kegiatan lain, sehingga target dan sasaran organisasi dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Disamping rencana kerja, dalam suatu organisasi juga diperlukan anggaran yang menggambarkan anggaran untuk membiayai kegiatan yang dibuat dalam rencana.

Anggaran dapat membantu organisasi dalam menjalankan usahanya selama tahun berjalan. Sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, anggaran mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem itu dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak pula persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya. Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi memiliki kaitan erat dengan penyusunan rencana, pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja dan evaluasi kegiatan.

Rencana kerja dan anggaran yang telah dibuat dan dilaksanakan harus dilakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan dari rencana yang dibuat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI	86 Nilai	82.16	95.50

Sumber : Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Sekretariat sebagai unit yang memberikan layanan dukungan manajemen dan teknis kepada unit Eselon II lainnya berusaha memberikan pelayanan

yang baik agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik termasuk layanan dalam penyusunan program, anggaran dan pelaporan BAPPEBTI.

Target Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI pada Tahun 2024 adalah sebesar 86.16 nilai, dan realisasi selama tahun 2024 adalah sebesar 82,16 atau sebesar 95,5%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 95,95% atau mengalami kenaikan sebesar 0.45%. Bila dibandingkan dengan target pada periode akhir Rencana Strategis (target 86), realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI pada tahun 2024 tercapai sebesar 82,16 atau 95,5% dari target periode akhir Rencana Strategis Sekretariat BAPPEBTI.

IK-5: Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran BAPPEBTI

Aspek keuangan merupakan bagian penting dalam suatu unit kerja atau organisasi. Tertib pengelolaan keuangan akan berdampak positif terhadap sistem pengelolaan organisasi secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi merupakan aspek penting untuk membangun tata kelola organisasi yang sehat dan kredibel.

Sekretariat BAPPEBTI menggunakan standar dan parameter di dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui indikator Hasil Pelaksanaan Anggaran berupa Capaian Output.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran BAPPEBTI (IKPA) pada Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 91,58% dari target tahun 2024 atau tercapai sebesar 99,54%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 tercapai sebesar 103,82% atau mengalami penurunan sebesar 4,28%. Bila capaian tahun 2024 dibandingkan dengan target pada periode akhir Rencana Strategis (target

92), realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI pada tahun 2024 tercapai sebesar 91,58 atau 99,54% dari target periode akhir Rencana Strategis Sekretariat BAPPEBTI.

Tabel 2.6 Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	92 Nilai	91.58	99.54

Sumber : Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Penurunan nilai IKPA pada tahun 2024 adalah karena adanya beberapa capaian output yang tidak dapat tercapai sampai akhir tahun 2024 karena adanya pemblokiran anggaran. Untuk itu, Sekretariat Bappebti tetap berupaya melakukan beberapa solusi antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan pencairan anggaran kegiatan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah dibuat dan di-input ke dalam aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- Memperkuat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran untuk meminimalisir revisi anggaran;
- Perencanaan anggaran kesesuaian dengan pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Adanya kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan dokumen keuangan secara tepat waktu kepada Kementerian Keuangan yang meliputi parameter penilaian yang tercantum dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit Eselon II BAPPEBTI sehingga dokumen pertanggungjawaban maupun pencairan anggaran dapat berjalan dengan baik;
- Adanya kesesuaian antara rencana penarikan anggaran dengan pelaksanaan anggaran;

- Adanya kepatuhan terhadap pemenuhan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pelaporan Keuangan, Laporan Perbendaharaan Pengeluaran dan Penerimaan Negara;

B. KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Sekretariat BAPPEBTI dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Pagu Awal sebesar Rp45.431.835.000,-, dimana di dalamnya termasuk belanja gaji dan tunjangan. Dari pagu tersebut telah dilakukan pergeseran belanja gaji dan tunjangan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan yang dilakukan bertahap. Pada tahap pertama dilakukan pergeseran belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp28.966.945.000,- dan selanjutnya dilakukan pergeseran belanja gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp.659.137.000,- sehingga pagu akhir Bappebti menjadi Rp15.805.753.000,- (termasuk anggaran yang terblokir sebesar Rp.1.669.937.000,-)

Berikut disampaikan data realisasi keuangan Sekretariat berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.

Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun Anggaran 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI	9.137.356.000	8.717.467.000	8.627.565.943	98,96
2	Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI	2.000.000.000	1.696.605.000	1.660.337.557	97,86
3	Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI	525.000.000	342.890.000	340.763.539	99,37
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI	2.132.144.000	1.541.096.000	1.536.702.827	99,71
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran BAPPEBTI	31.637.335.000	1.837.758.000	1.832.368.106	99,7
TOTAL		45.431.835.000	14.135.816.000	13.997.737.972	99,02

Sumber : Sekretariat BAPPEBTI, 2024

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. Visi dan Misi

Visi Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun dengan mengacu pada Visi Presiden Tahun 2025-2029, yaitu **“Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Yang Maju dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global”**.

Misi Guna mendukung operasionalisasi visi ke dalam bentuk peran, fungsi, dan program kerja yang nyata dan terukur, serta menjawab berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas maka Bappebti menyusun Misi Bappebti yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappebti. Terdapat rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam 2 (dua) misi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi periode 2025-2029 yaitu:

1. **Meningkatkan kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;**
2. **Menguatkan kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.**

B. Program, Kegiatan, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Program Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, Bappebti mendukung 2 (dua) program yaitu **“Program Perdagangan Dalam Negeri”** dan **“Program Dukungan Manajemen”**.

Kegiatan Dalam pelaksanaan program kerja, telah disusun beberapa aktivitas Sekretariat Bappebti yang telah tercantum dalam Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran Bappebti T.A. 2026 dalam kegiatan **“Dukungan**

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”.

Tujuan	Tujuan strategis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu: 1. Terwujudnya nilai tambah PBK, SRG, dan PLK dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri; 2. Terwujudnya peningkatan kontribusi PBK, SRG, dan PLK terhadap perdagangan domestik; dan 3. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih di lingkungan Bappebti.
Sasaran Kegiatan	Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, Sekretariat Bappebti berkontribusi dalam pencapaian sasaran: “Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”.

C. Indikator Sasaran Kegiatan dan Aktivitas Pendukung.

Indikator Sasaran Kegiatan	Untuk mencapai Sasaran Sekretariat Bappebti, maka ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut : 1. Predikat Penilaian Tertib Administrasi dengan target WTA Madya; 2. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Bappebti dengan target nilai 92;dan 3. Survey Kepuasan Masyarakat di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dengan target nilai 79. Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di atas, dilakukan pengelompokan Rincian Output ke dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) untuk menghindari kegiatan yang tumpang tindih. Pada tahun 2026 terdapat beberapa KRO di Sekretariat Bappebti yaitu: 1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (KRO) a) Peralatan Teknologi Infomasi dan Komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti (RO) Layanan ini terkait dukungan sekretariat dalam Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk seluruh
-----------------------------------	--

pegawai Bappebti. Kegiatanya berupa Penyediaan Backup Jaringan Internet selama 1 (satu) tahun anggaran dengan target **1 Unit** dan anggaran sebesar **Rp115.200.000,-** (*Seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah*).

2. Layanan Dukungan Manajemen Internal (KRO)

a) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (RO)

Layanan ini merupakan dukungan sekretariat diluar operasional perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan target sebesar **1 layanan** selama 1 (satu) tahun anggaran dan rincian sebagai berikut.

- **Pengelolaan Ketatausahaan**

Layanan ini berupa layanan ketatausahaan di setiap Eselon II di Bappebti dengan anggaran sebesar **Rp91.875.000,-** (*Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Layanan ini terkait dengan Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat di Bappebti baik itu untuk penatausahaan, pemindahtanganan, maupun pelaporan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp24.280.000,-** (*Dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

- **Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan**

Layanan ini terkait dengan pengelolaan informasi ke masyarakat serta terkait kerja sama dengan lembaga maupun stakeholder terkait PBK, SRG, dan PLK. Kegiatan ini antara lain penyusunan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Literasi PBK/SRG/PLK, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi, dan dukungan kehumasan. Anggaran yang ditetapkan dalam kegiatan ini sebesar **Rp199.871.000,-** (*Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

- **Perencanaan dan Penganggaran**

Layanan ini terkait dengan program, perencanaan, dan anggaran baik untuk tahun ke depan maupun pelaksanaan

di tahun berjalan. Kegiatannya antara lain koordinasi program kerja dan anggaran, penyusunan rencana kerja, dan penyusunan RKA-KL. Anggaran yang ditetapkan dalam kegiatan ini sebesar **Rp23.355.000,-** (*Dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

- Evaluasi dan Pelaporan

Layanan ini terkait dengan kegiatan evaluasi dan pelaporan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya baik dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Rincian kegiatannya berupa evaluasi program kerja, optimalisasi evaluasi kegiatan, penyusunan laporan kinerja triwulan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan RDP dengan DPR, serta penyusunan bahan rapat isu strategis. Anggaran yang telah ditetapkan untuk rincian output ini sebesar **Rp77.459.000,-** (*Tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

- Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian Bappebti

Layanan ini berupa layanan kesekretariatan Bappebti dalam pengelolaan kepegawaian seperti reformasi birokrasi, pengembangan kelembagaan, pelantikan/pengambilan sumpah jabatan, pengelolaan organisasi dan kepegawaian, serta peningkatan kapasitas pegawai. Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp37.668.000,-** (*Tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

- Pengelolaan Keuangan

Layanan ini berupa pengelolaan keuangan yang terdiri dari penyusunan Laporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan Satker, dan pengelolaan PNPB Bappebti. Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp 49.526.000,-** (*Empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

b) Layanan Perkantoran (RO)

Layanan ini merupakan dukungan sekretariat terhadap organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi serta operasional sehari-hari dengan rincian sebagai berikut.

- Operasional Perkantoran

- Layanan operasional ini terdiri dari belanja keperluan sehari-hari seperti alat tulis dan komputer supplies, air minum pegawai, toner, pembelian kertas, perpanjangan pajak kendaraan kantor, tanaman hias, maupun pengiriman surat dengan anggaran sebesar **Rp1.143.862.000,-** (*Satu milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- **Operasional Pimpinan**
Layanan operasional ini terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dengan anggaran sebesar **Rp1.033.530.000,-** (*Satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
 - **Jamuan Pertemuan Pimpinan**
Layanan ini berupa layanan berupa konsumsi seperti snack dan makan rapat pimpinan dengan anggaran sebesar **Rp48.600.000,-** (*Empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
 - **Honorarium Operasional Satuan Kerja**
Layanan ini berupa honor terkait Pengelola Keuangan di Bappebti seperti KPA, PPK, Bendahara, maupun operator aplikasi SAKTI dengan anggaran sebesar **Rp243.480.000,-** (*Dua ratus empat puluh tiga juta empat delapan puluh ribu rupiah*).
 - **Honorarium Dukungan Tenaga Kerja**
Layanan ini berupa honorarium tenaga kerja yang tidak masuk dalam ASN baik terkait gaji, Tunjangan Hari Raya (THR), asuransi ketenagakerjaan, maupun kesehatan pada outsourcing dengan anggaran sebesar **Rp864.198.000,-** (*Delapan ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
 - **Langganan Daya dan Jasa**
Layanan ini berupa biaya langganan aplikasi pertemuan online dan penyimpanan cloud dengan anggaran sebesar **Rp19.050.000,-** (*Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah*).
 - **Sewa Kendaraan Operasional**

Layanan ini berupa sewa kendaraan pimpinan dengan anggaran sebesar **Rp795.000.000,-** (*Tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan

Layanan ini berupa pemeliharaan dan operasional kendaraan pimpinan dan dinas. Dalam hal ini untuk kendaraan pimpinan berupa pembelian BBM sedangkan operasional termasuk service rutinnya. Anggaran pada komponen ini sebesar **Rp485.387.000,-** (*Empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

- Pemeliharaan dan Operasional Peralatan dan Mesin

Layanan ini berupa pemeliharaan perangkat operasional perkantoran seperti laptop, PC komputer, printer, scanner, maupun mesin fotokopi dan yang lainnya. Anggaran pada komponen ini sebesar **Rp167.570.000,-** (*Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

- Pengadaan Pakaian Dinas

Layanan ini berupa pembelian pakaian dinas pegawai termasuk didalamnya biaya jasa penjahitan. Adapun anggarannya sebesar **Rp362.400.000,-** (*Tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).

BAB IV

PENUTUP

1. Kegiatan Sekretariat Bappebti T.A. 2026 adalah **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi** untuk mendukung Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun program tersebut dibiayai dari APBN 2026 sebesar **Rp 5.953.077.000,- (Lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)**.
2. Indikator Kinerja Sekretariat Bappebti Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Rencana Strategis Bappebti 2025-2029 adalah:
 - a. Predikat Penilaian Tertib Administrasi dengan target **WTA Madya**;
 - b. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Bappebti dengan target **nilai 92**; dan
 - c. Survey Kepuasan Masyarakat di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dengan target **nilai 79**.

LAMPIRAN 1

FORMULIR

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT

TAHUN 2026

**FORMULIR RENCANA KINERJA
SEKRETARIAT BAPPEBTI
TAHUN 2026**

SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN TARGET
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Predikat Penilaian Tertib Administrasi Bappebti	WTA Madya	Predikat
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bappebti	92	Nilai
	Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	79	Nilai

Mengetahui, Desember 2025
Sekretaris Bappebti,



IVAN FITHRIYANTO

LAMPIRAN 2

FORMULIR APLIKASI

KRISNA BAPPENAS

TAHUN 2026

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. PROGRAM

:

WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM

:

02 - Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih
4. KEGIATAN

:

3758 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

01 - Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi		5.939.077,0
01.01	Predikat Penilaian Tertib Administrasi Bappebti	WTA Madya	
01.02	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Bappebti	92	
01.03	Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	79	
Total			5.939.077,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi										5.939.077,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										115.200,0
01.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti								000 - Bukan Tematik		115.200,0
	051 - Peralatan dan Mesin										115.200,0
		Pusat	Pusat								115.200,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja								000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										5.823.877,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								000 - Bukan Tematik		674.800,0
	051 - Pengelolaan Ketatausahaan										135.000,0
		Pusat	Pusat								135.000,0
	052 - Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)										30.000,0
		Pusat	Pusat								30.000,0
	053 - Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan										245.000,0
		Pusat	Pusat								245.000,0
	054 - Perencanaan dan Penganggaran										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	055 - Evaluasi dan Pelaporan										89.800,0
		Pusat	Pusat								89.800,0
	056 - Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian Bappebti										62.500,0
		Pusat	Pusat								62.500,0
	057 - Pengelolaan Keuangan										62.500,0
		Pusat	Pusat								62.500,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		5.149.077,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										5.149.077,0
		Pusat	Pusat								5.149.077,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								000 - Bukan Tematik		0,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
Total											5.939.077,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi				5.939.077,0				0,0	0,0	0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		115.200,0				0,0	0,0	0,0
01.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti	1	Unit		115.200,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CAN.001.051	Peralatan dan Mesin	1,0	Unit	115.200,0	115.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		0,0				0,0	0,0	0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.051	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Perkara		5.823.877,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7	Layanan		674.800,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.051	Pengelolaan Ketatausahaan	1,0	Layanan	135.000,0	135.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.052	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1,0	Layanan	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.053	Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan	1,0	Layanan	245.000,0	245.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.054	Perencanaan dan Penganggaran	1,0	Layanan	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.055	Evaluasi dan Pelaporan	1,0	Layanan	89.800,0	89.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.056	Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian Bappebti	1,0	Layanan	62.500,0	62.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.057	Pengelolaan Keuangan	1,0	Layanan	62.500,0	62.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		5.149.077,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	5.149.077,0	5.149.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ Paket		0,0				0,0	0,0	0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					5.939.077,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		115.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115.200,0
01.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti		115.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115.200,0
01.CAN.001.051	Peralatan dan Mesin	Utama	115.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115.200,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.051	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		5.823.877,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.823.877,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		674.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674.800,0
01.EBA.960.051	Pengelolaan Ketatausahaan	Utama	135.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135.000,0
01.EBA.960.052	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Utama	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.EBA.960.053	Pengelolaan Informasi Publik dan Humas	Utama	245.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245.000,0
01.EBA.960.054	Perencanaan dan Penganggaran	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.EBA.960.055	Evaluasi dan Pelaporan	Utama	89.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89.800,0
01.EBA.960.056	Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian Bappebti	Utama	62.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62.500,0
01.EBA.960.057	Pengelolaan Keuangan	Utama	62.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62.500,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		5.149.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.149.077,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	5.149.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.149.077,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			5.939.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.939.077,0

Jakarta, 25 Desember 2025

Sekretaris Bappebti

Ivan Fithriyanto
NIP. 197311032003121006

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2. PROGRAM

:

WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM

:

02 - Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih
4. KEGIATAN

:

3758 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

01 - Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi		5.939.077,0
01.01	Predikat Penilaian Tertib Administrasi Bappebti	WTA Madya	
01.02	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Bappebti	92	
01.03	Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	79	
Total			5.939.077,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi										5.939.077,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										115.200,0
01.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti								000 - Bukan Tematik		115.200,0
	051 - Peralatan dan Mesin										115.200,0
		Pusat	Pusat								115.200,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja								000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										5.823.877,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								000 - Bukan Tematik		674.800,0
	051 - Pengelolaan Ketatausahaan										135.000,0
		Pusat	Pusat								135.000,0
	052 - Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)										30.000,0
		Pusat	Pusat								30.000,0
	053 - Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan										245.000,0
		Pusat	Pusat								245.000,0
	054 - Perencanaan dan Penganggaran										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	055 - Evaluasi dan Pelaporan										89.800,0
		Pusat	Pusat								89.800,0
	056 - Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian Bappebti										62.500,0
		Pusat	Pusat								62.500,0
	057 - Pengelolaan Keuangan										62.500,0
		Pusat	Pusat								62.500,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		5.149.077,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										5.149.077,0
		Pusat	Pusat								5.149.077,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								000 - Bukan Tematik		0,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
Total											5.939.077,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi				5.939.077,0				0,0	0,0	0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		115.200,0				0,0	0,0	0,0
01.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti	1	Unit		115.200,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CAN.001.051	Peralatan dan Mesin	1,0	Unit	115.200,0	115.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		0,0				0,0	0,0	0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.051	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Perkara		5.823.877,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7	Layanan		674.800,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.051	Pengelolaan Ketatausahaan	1,0	Layanan	135.000,0	135.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.052	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1,0	Layanan	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.053	Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan	1,0	Layanan	245.000,0	245.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.054	Perencanaan dan Penganggaran	1,0	Layanan	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.055	Evaluasi dan Pelaporan	1,0	Layanan	89.800,0	89.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.056	Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian Bappebti	1,0	Layanan	62.500,0	62.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.057	Pengelolaan Keuangan	1,0	Layanan	62.500,0	62.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		5.149.077,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	5.149.077,0	5.149.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ Paket		0,0				0,0	0,0	0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					5.939.077,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		115.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115.200,0
01.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti		115.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115.200,0
01.CAN.001.051	Peralatan dan Mesin	Utama	115.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115.200,0
01.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.001.051	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		5.823.877,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.823.877,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		674.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674.800,0
01.EBA.960.051	Pengelolaan Ketatausahaan	Utama	135.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135.000,0
01.EBA.960.052	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Utama	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
01.EBA.960.053	Pengelolaan Informasi Publik dan Humas	Utama	245.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245.000,0
01.EBA.960.054	Perencanaan dan Penganggaran	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.EBA.960.055	Evaluasi dan Pelaporan	Utama	89.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89.800,0
01.EBA.960.056	Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian Bappebti	Utama	62.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62.500,0
01.EBA.960.057	Pengelolaan Keuangan	Utama	62.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62.500,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		5.149.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.149.077,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	5.149.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.149.077,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			5.939.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.939.077,0

Jakarta, 25 Desember 2025

Sekretaris Bappebti

Ivan Fithriyanto
NIP. 197311032003121006